

Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Bidang Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 7 Medan

Uswatun Hasanah^{a,1}, Amiruddin Siahaan^{b,2}

^{a,b} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹ uswae01@gmail.com; ² amiruddinsiahaan@uinsu.ac.id

AINFO	ABSTRACT
<i>Riwayat Artikel:</i> Diterima: 27 Februari 2025 Direvisi: 15 Mei 2025 Disetujui: 21 Juni 2025 Tersedia Daring: 31 Juli 2025 <i>Keywords:</i> <i>Implementasi</i> <i>Kebijakan pendidikan</i> <i>Kualitas Pembelajaran</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Muhammadiyah 7 Medan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah, warga sekolah, dan orang tua siswa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta menghasilkan lulusan yang unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inovasi kebijakan dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, seperti penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran, ketentuan baru bagi guru terkait penggunaan atribut sekolah, serta penegakan kedisiplinan waktu dengan perubahan batas waktu masuk dari pukul 07.30 menjadi 07.10. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang dan dijalankan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak internal maupun eksternal sekolah.
ABSTRAK	
<i>Keywords:</i> <i>Social Conflict</i> <i>Conflict Resolution</i> <i>Qur'anic Values</i>	<i>This study aims to explore how education policy is implemented and its impact on improving the quality of learning at SMP Muhammadiyah 7 Medan. The policy implementation is conducted through a mutual agreement between the school, school community, and parents, with the main objective of improving the quality of the learning process and producing excellent graduates. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection methods in the form of observation, interviews, and document review. The results showed that there were policy innovations compared to the previous school year, such as the application of the Deep Learning approach in learning, new provisions for teachers regarding the use of school attributes, and the enforcement of time discipline by changing the entry deadline from 07.30 to 07.10. These policies were designed and implemented based on the results of an agreement between internal and external parties of the school.</i>

©2025, Uswatun Hasanah, Amiruddin Siahaan
This is an open access article under CC BY -SA license



1. Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai yang akan membentuk cara manusia menjalani kehidupannya, sekaligus menjadi sarana dalam memperbaiki peradaban manusia. Tanpa akses terhadap pendidikan, manusia masa kini tidak akan berbeda dengan mereka di masa lalu, karena akan tertinggal dalam hal pemberdayaan dan kualitas hidup. Di Indonesia, persoalan dalam dunia pendidikan sangat kompleks, mulai dari kurikulum, kualitas

pembelajaran, kompetensi pendidik, hingga kepemimpinan di berbagai jenjang. Di lapangan, banyak guru dan kepala sekolah yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan, khususnya dalam aspek manajerial, kedisiplinan, birokrasi, dan urusan administratif (Siahaan et al., 2023). Kepemimpinan di sekolah juga dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra dunia pendidikan dan bahkan dapat memperparah konflik internal di kalangan pendidik (Tinting et al., 2023).

Gerakan reformasi di Indonesia membawa harapan baru bagi perubahan kehidupan berbangsa, terutama dalam sektor pendidikan. Namun demikian, perkembangan pendidikan justru memunculkan persoalan baru, seperti ketidakjelasan arah dan tujuan persekolahan yang terus berlangsung hingga kini. Suasana pembelajaran yang ideal seharusnya mencerminkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah (Pitri et al., 2022). Sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan nasional, pendidikan memiliki peranan krusial dalam menentukan masa depan bangsa. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah sangat memengaruhi mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa (Siahaan et al., 2022). Pendidikan Indonesia perlu segera ditingkatkan jika ingin menghasilkan generasi-generasi individu yang tangguh yang mampu bersaing dengan bangsa lain dan tidak ketinggalan tren global. Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan saat ini ialah perubahan kebijakan ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum dan pelatihan guru (Akmalia et al., 2023). Namun, penerapan kebijakan ini tidak jarang dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan yang kurang optimal, serta adanya penolakan atau resistensi dari berbagai pihak.

Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diarahkan langsung kepada pihak tertentu dalam rangka mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan di bidang pendidikan. Implementasi kebijakan merupakan tahap akhir dari rangkaian panjang proses penyusunan kebijakan (Harahap, 2021). Meskipun berada di tahap akhir, pelaksanaan kebijakan justru menjadi elemen paling krusial dalam keberhasilan sebuah kebijakan, termasuk di sektor pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun rancangan sebuah kebijakan, tidak akan memberikan dampak nyata tanpa implementasi yang efektif (Rahman, 2023). Oleh sebab itu, baik proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan harus sama-sama diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak selalu sesuai harapan (Ihsan et al., 2021).

Tahapan eksekusi kebijakan sering kali dianggap sekadar penyederhanaan dari seluruh siklus strategi, padahal sesungguhnya implementasi merupakan inti dari keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Sehebat apapun kebijakan dirancang, akan menjadi sia-sia tanpa implementasi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh (Supriadi, 2011). Di bidang pendidikan, keberadaan suatu kebijakan pada dasarnya merupakan respons terhadap persoalan yang muncul dalam sistem pendidikan itu sendiri. Ketimpangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan kenyataan pelaksanaannya sering kali menimbulkan masalah (Navy, 2013). Proses implementasi kebijakan bersifat dinamis dan sangat menentukan keberhasilan akhir, karena pada tahap inilah kegiatan nyata berlangsung dan hasilnya akan menunjukkan apakah tujuan kebijakan tercapai.

Hasil observasi awal di SMP Muhammadiyah 7 Medan menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain adalah pelaksanaan ibadah secara rutin, pengintegrasian guru non-Muhammadiyah ke dalam nilai-nilai Muhammadiyah, penerapan dua kurikulum (yakni kurikulum dari dinas pendidikan dan kurikulum Muhammadiyah), serta kepatuhan masyarakat sekolah terhadap aturan sekolah. Namun, terdapat berbagai hambatan, seperti masih adanya

siswa yang tidak mematuhi kebijakan, kekurangan sarana dan prasarana (termasuk ruang khusus untuk pelajaran keagamaan dan laboratorium penunjang), serta kendala pembiayaan untuk alat pembelajaran dan penyusunan buku ajar.

Dalam studi sebelumnya, (Muharnis, M., & Fadriati, 2023) menemukan bahwa implementasi kebijakan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sementara itu, (Iksan et al., 2024) menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan menitikberatkan pada interaksi antara guru, siswa, pihak sekolah, dan dukungan perangkat pembelajaran lainnya. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menelaah proses implementasi kebijakan di sekolah secara umum, tetapi juga menganalisis dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran setelah diterapkan (Darmastuti, 2014). Jika kebijakan pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasil belajar siswa pun cenderung tidak optimal. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan di sekolah serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran dan perkembangan siswa. Dengan memahami faktor keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambil kebijakan di sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud mendalami dan menghayati suatu obyek mengenai implementasi kebijakan pendidikan dan dampaknya. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fakta, data, dan objek penelitian secara sistematis dan sesuai dengan situasi alamiah. Terkait hal yang diteliti, hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada hasil, dan hasil penelitian tidak mengikat serta dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan penelitian dan diinterpretasikan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau deskriptif berdasarkan fakta di lapangan (Creswell, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan yang sudah diterapkan di sekolah SMP Muhammadiyah 7 Medan yaitu, penerapan kebijakan baru oleh kepala sekolah yang baru yang mana untuk kurikulum menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar dengan pendekatan Deep Learning dan juga sekolah tersebut sudah diunggulkan maka kebijakan dilakukan perubahan dilihat dari jam masuk sekolah dirubah menjadi lebih cepat dari tahun ajaran sebelumnya. Kemudian dalam sehari siswa/siswi menghafal sebanyak 3 kosa kata yakni Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang. Kebijakan lainnya yakni untuk para guru diharuskan memakai atribut sesuai ketentuan dari pihak sekolah dan mengikuti pelatihan IT, pelatihan kurikulum Merdeka dengan pendekatan Deep Learning yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan. Maka dari itu, pembelajaran di kelas dilakukan penerapan sesuai pelatihan guru tentang Deep Learning. Dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan baru di sekolah yakni melibatkan kepala sekolah, para masyarakat sekolah lainnya termasuk juga komite sekolah sebagai wakil dari wali siswa. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara internal terlebih dahulu kemudian secara eksternal karena memang pengambilan keputusan tidak bisa hanya dari satu pihak saja melainkan pihak lain juga dapat memberikan pendapat guna menyepakati kebijakan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Kepala sekolah menilai kualitas pembelajaran dinilai dari banyaknya alumni dari sekolah tersebut pada tahun ajaran sebelumnya masuk ke sekolah negeri favorit. Untuk langkah

yang dilakukan untuk proses pembelajaran agar berjalan dengan baik yaitu sebelum melakukan proses pembelajaran guru melakukan rapat terlebih dahulu, ada dibentuk guru mgmp setelah itu menelaah pendekatan Deep Learning dan melaksanakan di kelas yang mana hasil ujiannya akan tau setahun kedepan.

Mengenai dampak yang terjadi dari kebijakan yang sudah diterapkan ialah dengan guru diwajibkan untuk membuat perangkat pembelajaran dan dampak pada siswanya mereka terlihat sangat antusias atau terlihat lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang berbeda karena memang dalam proses pembelajaran yang baru siswa dituntut untuk lebih belajar secara mendalam, fokus, dan senang mengikuti pembelajaran. Dalam mengetahui proses pembelajaran itu berjalan baik atau tidak di evaluasi selama 2-6 bulan sekali dengan diadakan pertemuan para guru dan diberi kesempatan untuk menjelaskan keadaan kelas masing-masing setelah diterapkannya pendekatan Deep Learning tersebut. Pihak sekolah mengharapkan dengan pembaharuan ini masyarakat sekolah dapat lebih disiplin lagi dan lebih memahami bahwa pendidikan itu penting tidak hanya untuk siswa saja tetapi bagi guru dan atasan juga penting untuk terus belajar guna menjadikan pendidikan sebagai acuan untuk hidup bermasyarakat dengan tidak lupa untuk menerapkan perilaku yang baik dan ilmu yang didapatkan berguna di masa yang akan datang.

Pembahasan

Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bersifat intelektual sekaligus praktis, yang bertujuan untuk menciptakan, mengevaluasi secara kritis, dan menyampaikan pengetahuan dalam konteks pengkajian kebijakan. Ia memandang analisis kebijakan sebagai cabang ilmu sosial terapan yang menggabungkan beragam metode penelitian dan teknik argumentasi guna menghasilkan informasi yang relevan dalam mengkaji persoalan sosial yang mungkin timbul sebagai dampak dari kebijakan tertentu. Analisis ini bertujuan memberikan dasar informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan dan menawarkan opsi-opsi perbaikan. Proses analisis kebijakan bisa dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, terutama dalam mengevaluasi program-program yang telah dijalankan (Dunn, 1999).

Di SMP Muhammadiyah 7 Medan, kebijakan sekolah selaras dengan pedoman dari dinas pendidikan, termasuk dalam penggunaan kurikulum, tata tertib sekolah, dan sistem pembelajaran. Warga sekolah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap aturan, termasuk kedisiplinan waktu. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah pelaksanaan salat berjamaah mulai dari salat Dhuha hingga Ashar di masjid dekat sekolah. Melalui pembiasaan ini, siswa dilatih sejak dini untuk tidak meninggalkan kewajiban salat. Kualitas pembelajaran sendiri diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pendidikan (Hamid et al., 2020). SMP Muhammadiyah 7 Medan menunjukkan capaian pembelajaran yang positif pada tahun ajaran sebelumnya, dibuktikan dengan banyaknya alumni yang diterima di sekolah negeri unggulan sesuai minat dan potensi mereka. Pada tahun ajaran 2025/2026, sekolah ini mulai menerapkan pendekatan *Deep Learning* sebagai uji coba, untuk mendorong siswa belajar lebih dalam, aktif, dan mampu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata.

Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran juga mengacu pada prinsip-prinsip belajar yang melibatkan siswa dan guru. Prinsip-prinsip tersebut meliputi motivasi, keterlibatan aktif, pengalaman langsung, pengulangan, pemberian umpan balik, dan penguatan. Prinsip-prinsip ini membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif, sekaligus menghindari metode yang tidak mendukung perkembangan belajar siswa (Mughiroh, 2002). Sejalan dengan pendapat Drs. Daryanto, kualitas pembelajaran mencerminkan pencapaian tujuan awal

pembelajaran, termasuk dalam pendidikan seni, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap siswa dalam proses belajar di kelas (Noor, 2010). Kebijakan pendidikan yang diterapkan memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu pembelajaran, terutama melalui inovasi dalam pendekatan pembelajaran, metode mengajar, serta evaluasi guru. Umpan balik yang tepat memungkinkan guru mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa, sehingga pengembangan kompetensi menjadi lebih terarah. Selain itu, kebijakan ini juga merangsang kreativitas, meningkatkan motivasi guru, dan mendorong budaya belajar yang berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan ini belum merata. Di wilayah perkotaan dengan akses teknologi dan infrastruktur yang baik, dampak positif sudah mulai terlihat dalam peningkatan mutu pembelajaran. Sebaliknya, daerah terpencil masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kebijakan tersebut karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan (Nashrullah et al., 2025). Di SMP Muhammadiyah 7 Medan, implementasi kebijakan baru telah menunjukkan hasil awal yang baik meskipun baru berlangsung beberapa bulan. Respons positif dari warga sekolah menjadi indikasi awal keberhasilan, namun evaluasi lanjutan akan terus dilakukan dalam rentang waktu 2 hingga 6 bulan ke depan.

4. Kesimpulan

Pendidikan mencakup unsur-unsur penting yang berkaitan dengan cara seseorang memahami suatu hal dari sudut pandang keilmuan, baik dalam hal tujuan, proses, maupun lingkungan belajarnya. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membantu individu dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Konsep pendidikan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu melahirkan generasi berkualitas yang tidak kalah dari kecanggihan teknologi buatan manusia seperti robot. Dalam penerapannya, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kesepakatan antara pihak internal dan eksternal agar pelaksanaannya berjalan secara efektif. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, penyelenggaraannya harus mengikuti prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Dampak dari kebijakan pendidikan terhadap mutu pembelajaran menjadi perhatian utama bagi sekolah, karena kebijakan tersebut menjadi dasar dalam menjalankan proses pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari peningkatan kreativitas guru, kualitas interaksi antara guru dan siswa di kelas, serta bagaimana proses pembelajaran berlangsung secara keseluruhan.

5. Daftar Pustaka

- Akmalia, R., Nst, W. N., & Siahaan, A. (2023). *Pengaruh Efeksi Diri, Budaya Organisasi, Motivasi Berprestasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Batubara* [Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan]. <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/21297/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
- Darmastuti, H. (2014). Manajemen Sarana dan Prasana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemenpendidikan/article/view/6606>

- Hamid, M. A., Ramadhani, R., Masrul, M., Juliana, J., Safitri, M., Munsarif, M., Jamaludin, J., & Simarmata, J. (2020). Media pembelajaran. In *Media pembelajaran*.
- Harahap, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/11770/>
- Ihsan, R. A. N., Jannah, A. M., Sofia, M. N., Budiyan, N., & Gunawan. (2021). PROBLEMATIKA DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v1i1.280>
- Iksan, M., Acoci, Tarno, & Matje, I. (2024). Pelaksanaan Keterpaduan Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Perangkat Pembelajaran dan Sistem Evaluasi Sekolah Menengah Pertama. *JPW: Jurnal Pengabdian Wakaaka*, 3(3), 89–99. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/WAKAACA/article/view/7131>
- Mughiroh. (2002). *Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar*.
- Muharnis, M., & Fadriati, F. (2023). Analisis implementasi kebijakan kurikulum pendidikan nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.12677>
- Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & Budiyan, N. (2025). Transformasi Digital dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 52–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Navy, A. (2013). Manajemen Sumber Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sains. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 1(4), 388–395. journal.um.ac.id
- Noor, M. (2010). *Media Pembelajaran Berbasis Teknologi*. Multi Kreasi Satudelapan.
- Pitri, A., Ali, H., & Us, K. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>
- Rahman, M. A. (2023). *Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi Program Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” (MBKM) di Perguruan Tinggi*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/m32va/>
- Siahaan, A., Akmalia, R., Syafriani, Y., Ramadhani, S., Ahmad, A. K., & Sihombing, H. R. S. (2022). Manajemen Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar di SMP Negeri 2 Binjai. *ANWARUL*, 2(6), 436–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i6.696>
- Siahaan, A., Akmalia, R., Syahkila, A., Situmorang, M. S., Dahyanti, N., Harahap, T. S. A., & Ramadhan, S. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di MTs Al-Jihad Medan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 714–721. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4085>

Supriadi, A. (2011). Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 18(1), 36–46.

Tintingon, J. Y. L., Reflie, H. R., & Joufree, V. N. (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>